

## Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Ira Gustina<sup>1\*</sup>, Siti Afrida<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Indragiri, Riau, Indonesia, [iragustina85@gmail.com](mailto:iragustina85@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Indragiri, Riau, Indonesia, [afrida090@gmail.com](mailto:afrida090@gmail.com)

\*Corresponding Author: [iragustina85@gmail.com](mailto:iragustina85@gmail.com)

---

### Info Artikel

Diterima, 20-08-2021

Direvisi, 27-09-2021

Dipublikasi, 29-10-2021

---

### Kata Kunci:

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

---

### Keywords:

Competence Of Human Resources, Internal Control System, Local Government Financial Reports

---

### Abstrak

Penelitian bertujuan menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah 70 pejabat dan pegawai pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari pegawai Honorer, pegawai/staff yang bekerja di bagian keuangan, kepala OPD di OPD Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengambil keputusan dalam menggunakan anggaran dan menggunakan barang. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini ialah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian. Kuesioner yang disebarkan ialah 70 kuesioner, dan terdapat 50 kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 1) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2) sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai koefisiensi determinasi (*Adjust R Square*) sebesar 0,333 atau 33,3% yang berarti Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern sebesar 33,3%.

---

### Abstract

This study aims to examine the effect of human resource competence and internal control systems on the quality of the Regional Government Financial Reports of Indragiri Hilir Regency. The population in this study were 70 officials and financial management employees at the Regional Apparatus Organization (OPD) of the Indragiri Hilir Regency Government which consisted of honorary employees, employees/staff working in the finance department, the head of the OPD in the Indragiri Hilir Regency OPD as decision makers in using budget and use of goods. Data collection technique in this research is by distributing questionnaires to research respondents. The questionnaires distributed were 70 questionnaires, and there were 50 questionnaires that were returned and could be processed. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. This study shows the results that 1) human resource competence has a positive and significant effect on the quality of the Regional Government Financial Reports of Indragiri Hilir Regency, 2) the internal control system has no significant effect on the quality of the Regional Government Financial Reports of Indragiri Hilir Regency. The coefficient of determination (*Adjust R Square*) is 0.333 or 33.3%, which means that the quality of the financial statements of the Indragiri Hilir Regency Government is influenced by the competence of human resources and the internal control system of 33.3%.

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Namun seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Tujuan umum laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2010), adalah kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan pelaporan otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat dan gambaran. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab pengelola organisasi. Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan dokumen pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan masing-masing SKPD selanjutnya laporan keuangan tersebut di kondolidasikan oleh Satuak Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang kemudian menjadi Laporan Keuangan Keuangan Daerah (LKPD). Setelah dikonsolidasikan menjadi LKPD tidak langsung dipublikasi namun diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyatakan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian dipublikasi dan dilaporkan ke stakeholder. Oleh karena itu kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tidak langsung dapat dilihat dari opini BPK. Apabila angka-angka tersaji dalam LKPD bukanlah yang sesungguhnya, maka informasi yang terkandung dalam rasio keuangan yang dianalisis untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi kurang tepat. Para pengguna LKPD antara lain pemerintah daerah (internal), DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi dan pemerhati Pemda, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat.

Banyak nya kasus tentang buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang harus dikaji lebih dalam. Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum disebabkan oleh penyusunan laporan keuangngan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan, pengendalian intern dan juga kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dilaksanakan oleh BPK masih relatif sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dalam ikhtisar pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK pada bulan september 2015 yang memberikan informasi bahwa LKPD yang diaudit oleh BPK yang memperoleh opini WTP hanya 26% (105) dari 398 kabupaten dan 38% (35) dari 93 kota. Menurut badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) tidak diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) disebabkan oleh beberapa faktor, faktor

tersebut adalah kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mendapatkan hasil audit Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau selama 4 tahun berturut-turut yakni dari tahun 2016 hingga 2019. Predikat WTP kinerja keuangan ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kota se-provinsi Riau. (m.goriau.com).

Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan secara wajar dan berkualitas. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah ini sangat menarik dikaji lebih lanjut. Laporan yang berkualitas juga sangat dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bisa dikatakan cukup baik. Akan tetapi tetap harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern dengan tegas agar apabila ada pelanggaran atau terjadinya temuan-temuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bisa segera berbenah.

Nassarudin (2008) dalam Ihsanti (2014), menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan dan keterampilan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Kompetensi yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah antara lain pemahaman dalam akuntansi pemerintah pemerintah dan penguasaan penggunaan aplikasi yang ada. Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu. Selain sumber daya manusia yang kompeten, penerapan sistem pengendalian intern juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengendalian intern dalam suatu organisasi, perusahaan, lembaga organisasi profit maupun non profit mutlak menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang paling umum terjadi ialah korupsi, kesalahan administrasi serta pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik (Triyanti, 2017). Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir

terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi pondasi dari pengendalian ini adalah orang-orang (SDM) didalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah, disamping itu terdapat sistem lainnya adalah sistem pengendalian ekstern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sedangkan pengendalian ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya. (Triyanti, 2017). SPIP menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pada unit kerja tapi hingga kepada masing-masing individu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah adalah : (1) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir? (2) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) pengaruh kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. (2) pengaruh sistem pengendalian intern secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Dessler, Gary. (2003) Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau *manpower*.

Pengertian SDM di atas mengandung aspek kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja, dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk

produksi. Pengertian di atas juga menegaskan bahwa SDM mempunyai peranan sebagai faktor produksi.

Menurut Sumarsono (2009), Pendayagunaan SDM untuk menghasilkan barang dan jasa dipengaruhi oleh dua kelompok faktor yaitu, pertama, yang memengaruhi jumlah dan kualitas SDM tersebut, dan, kedua, faktor dan kondisi yang memengaruhi pengembangan perekonomian yang kemudian memengaruhi pendayagunaan SDM tersebut.

Dalam (Triyanti, 2017), mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Kompetensi, dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik didasarkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Menurut Prihadi (2010), laporan keuangan adalah laporan yang mencerminkan kinerja perusahaan tersebut. Surya (2012), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Hery (2015), Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan adalah “Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya”. (IAI, 2002 : par 47).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan maupun organisasi selama jangka waktu tertentu.

### **Tujuan laporan Keuangan**

Menurut Yadiati (2007), Laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi tujuan laporan keuangan bagi organisasi bisnis berbeda dengan organisasi nonbisnis (nirlaba). Perbedaan tujuan tersebut dikarenakan karakteristik organisasi yang berbeda. *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan organisasi nonbisnis sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna dalam mengambil keputusan rasional tentang alokasi sumber daya dalam organisasi.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi penyedia sumber daya dalam menilai jasa yang diberikan oleh organisasi nonbisnis dan kemampuannya untuk meneruskan penyediaan jasa tersebut.
3. Memberikan informasi yang berguna untuk menilai pekerjaan manajemen dan kinerja manajer organisasi nonbisnis dalam melaksanakan tugasnya, seperti akuntabilitasnya.

Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, penggunaan sumber daya, aktivitas organisasi, atau sumber daya bersih dari organisasi nonbisnis tersebut.

### **Karakteristik Laporan Keuangan**

#### 1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, para pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi bisnis, dan akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

#### 2. Relevan

Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan (*predictive*), menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu (*confirmatory*).

#### 3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus handal (*reliable*). Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Selain itu, informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu (netralitas). Dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, maka ketidakpastian tersebut diakui dengan menggunakan hakekat dan tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*). Agar dapat diandalkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya (kelengkapan).

#### 4. Dapat dibandingkan

Para pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Untuk memenuhi kualitas tersebut maka pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Fungsinya adalah bahwa para pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut serta mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan secara relatif dengan membandingkan dengan periode yang lalu.

### METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian merupakan rencana dari struktur riset yang mengarahkan proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien dan efektif (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif (*causal comparative research*). Penelitian kausal komparatif merupakan suatu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Indriantoro dan Supomo, 2016).

Peneliti melakukan pengamatan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor-faktor penyebabnya. Tujuan penelitian ini untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas, yaitu: Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap variabel terikat Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini dilakukan di 35 OPD Kabupaten Indragiri Hilir yang lokasinya tersebar di beberapa lokasi yang berbeda pada tahun 2021 selama 3 bulan. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai/staf yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan dan para pegawai/staf pemegang kas/bendahara penerimaan maupun pengeluaran pada OPD di Kabupaten Indragiri Hilir.

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Adapun langkah- langkah analisisnya sebagai berikut.

1. Statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. (Nurindriantoro, 2016)
2. Uji asumsi klasik, dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda. Uji-uji yang dilakukan adalah :
  - a. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dua model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Untuk menguji normalitas data, salah satu cara yang digunakan adalah dengan melihat hasil dari uji *Kolmogorof Smirnov*. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

- b. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians (*variance*) dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain (Ghozali, 2011). Jika varian dari residual dari suatu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan menganalisis titik yang terdapat pada *scatterplot* yang dihasilkan oleh pengolahan data spss.
- c. Uji Multikolinieritas, Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika  $VIF > 10$  dan nilai tolerance  $< 0,10$  maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2006) dalam (Efendy, 2010).
3. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
4. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Siregar, 2013;252). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen.
5. Uji Hipotesis  
 Uji Parsial (uji t); Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sunyoto, 2013).  
 $H_{0,2}: \beta = 0$ , Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.  
 $H_{a,2}: \beta \neq 0$ , Sumber daya manusia bidang keuangan dan sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif akan menunjukkan gambaran mengenai suatu data yang akan diteliti. Adapun data deskriptif meliputi nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi dari semua variabel penelitian yang akan dianalisis.

**Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SDM	50	19	29	24,54	2,509
Pengendalian Intern	50	29	49	41,54	4,514
kualitas keuangan	50	31	40	34,88	3,192
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data Olahan SPSS (Versi 26), 2021

Berdasarkan data olahan pada tabel 1 dapat dilihat jumlah N yang valid adalah 50, jumlah minimum data pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebesar 19, nilai Minimum data pada variabel Sistem Pengendalian Intern adalah sebesar 29, dan nilai minimum variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebesar 31. Nilai maksimum data pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebesar 29, nilai Minimum data pada variabel Sistem Pengendalian Intern adalah sebesar 49, dan nilai minimum variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebesar 40.

Variabel sumber daya manusia memiliki nilai mean sebesar 24,54 dengan standar deviasi sebesar 2,509. Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai mean sebesar 41,54 dengan standar deviasi sebesar 4,514. Dan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai mean sebesar 34,88 dengan standar deviasi sebesar 3,192.

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa 50 sampel setiap variabel pada penelitian ini telah memenuhi standar normal, hal ini diketahui berdasarkan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai mean sehingga data dinyatakan normal.

### Uji Asumsi Klasik

Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Hasil Uji Normalitas, perhitungan uji one sample kolmogorov smirnov dengan menggunakan software SPSS 20 menunjukkan, bahwa signifikansi hasilnya diatas 0,05 yaitu 0.200 mengindikasikan bahwa residual data telah berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05.
2. Hasil Uji Multikolineritas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas (independen) karena variabel sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal menunjukkan nilai VIF < 10.
3. Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Setelah dilakukan uji glejser dengan menggunakan software SPSS 20 menunjukkan, bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi karena nilai signifikansi variabel sumber daya manusia 0.329 dan sistem pengendalian internal 0.114 semua variabel nilainya di atas 0.05

### Analisi Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan jika peneliti bermaksud meramalkan keadaan (naik turunnya) variabel dependen, apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor (Sugiyono, 2010:275). Dalam penelitian ini, hasil uji regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,283	4,305		3,085	,003
	SDM	,616	,159	,484	3,869	,000
	Pengendalian Intern	,156	,088	,221	1,764	,084

a. Dependent Variable: kualitas keuangan

Sumber : Data Olahan SPSS (Versi 26), 2021

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.11, maka diperoleh

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 13,283 + 0,616 X_1 + 0,156 X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan diatas diketahui :

1. Konstanta sebesar 13,283 menyatakan bahwa apabila kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern bernilai nol, maka nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 13,283.
2. Variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,616 menyatakan bahwa setiap kenaikan nilai kompetensi sumber daya manusia sebesar satu satuan (Dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap dan tidak berubah), maka akan menaikkan nilai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,616.

### Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan suatu model regresi menerangkan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,600 <sup>a</sup>	,360	,333	2,607

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, SDM  
b. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sumber : Data Olahan SPSS (Versi 26), 2021.

Berdasarkan hasil uji pada tabel 3 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjust R Square*) sebesar 0,333 atau sebesar 33.3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 33.3% kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Sedangkan 66.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut ini hasil uji parsial disajikan pada tabel 4 sebagai berikut

**Tabel 4 Hasil Uji Signifikansi Individual**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,283	4,305		3,085	,003
	SDM	,616	,159	,484	3,869	,000
	Pengendalian Intern	,156	,088	,221	1,764	,084

a. Dependent Variable: kualitas keuangan

Sumber : Data Olahan SPSS (Versi 26), 2021

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4, variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 3,869 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,01174, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan

signifikansi 0.000 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Maka  $H_1$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Variabel sistem pengendalian intern memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 1,764 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,01174, sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.084 yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0.05. Maka  $H_2$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,869 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,01174, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.000 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 maka  $H_1$  diterima. hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, maka semakin rendah pula kualitas laporan keuangan yang akan disajikan oleh pemerintah Kabupaten Inhil.

Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini yaitu sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik, memiliki pemahaman mengenai akuntansi dan keuangan serta memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tanggungjawabnya yang dalam hal ini adalah akuntansi dan keuangan, akan berdampak pada pengelolaan keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saraswati dan Budiasih, (2019) yang membuktikan secara empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia yang tergolong baik bisa dilihat dengan banyaknya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pegawai. Hasil penelitian Pujanira, (2017) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Syahadatina dan Fitriyana, (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Teori regulasi mendukung hasil dari penelitian ini dimana teori regulasi menyatakan bahwa sumber daya manusia yang diberi wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah harus selalu berpedoman pada regulasi dan landasan hukum yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Untuk meningkatkan efektivitas dari pengelolaan keuangan serta peningkatan kualitas laporan keuangan, pemerintah berupaya dengan melakukan peningkatan terhadap kompetensi dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga pencatatan sampai dengan laporan keuangan menjadi semakin baik.

## **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga  $H_2$  ditolak. Hal ini dilihat berdasarkan  $t_{hitung}$  sebesar 1,764 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,01174, sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.084 yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka  $H_2$  ditolak.

Sistem pengendalian intern yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal tersebut juga menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari efektivitas pengendalian internalnya saja, sehingga aparatur pemerintah harus mampu memenuhi aspek-aspek lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Aspek-aspek tersebut diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Triono dan Dewi, (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penelitian Budiawan dan Purnomo (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Munasyir, (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Teori kepatuhan mendukung hasil dari penelitian ini dimana teori kepatuhan menyatakan bahwa hubungan antara SPI dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana pengendalian intern ditunjukkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, telah patuh terhadap hukum yang berlaku serta meningkatkan kegiatan operasi secara efektif dan efisien.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat dan pegawai pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil analisis kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,869 > 2,01174$ ) dan signifikansinya sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan searah pada kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil analisis sistem pengendalian intern dengan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $1,764 < 2,01174$ ) dan nilai signifikansinya sebesar 0,084 yang berarti besar dari 0,05 ( $0,084 > 0,05$ ).

Maka SPI memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Saran**

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari efektivitas pengendalian internalnya saja, sehingga aparatur pemerintah harus mampu memenuhi aspek-aspek lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Aspek-aspek tersebut diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

kekurangan dari penelitian ini adalah adanya keterbatasan data yang penulis miliki dimana ada data sekunder yang digunakan tidak dapat mengukur seberapa fatal temuan kasus kelemahan sistem pengendalian internal masing-masing daerah, maka untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian serupa dapat melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan data sekunder lain yang menunjukkan materialitas dari masing-masing temuan kelemahan SPI atau menggunakan data primer berupa kuesioner.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan variabel lain, yang lebih dari dua atau tiga variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Inhil. Untuk itu disarankan untuk peneliti selanjutnya menambah variabel seperti kinerja pengelola keuangan daerah, penerapan SAP, dan Teknologi informasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dessler, Gary. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kespuluh Jilid 1*. Klaten: PT. INTAN SEJATI.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisa Laporan Keuangan*. PPM. Yogyakarta
- Financial Accounting Standard Board. 2008. *Statement of Financial Accounting Concept No. 2 Qualitative Characteristics of Accounting Information*. Financial Accounting Standard Board.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. CAPS, Yogyakarta.
- Ihsanti, Emilda. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Skripsi. Program Studi Akuntansi FE Universitas Negeri Padang.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mathis, Robert. L dan Jackson, John H. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Modo, Sintike Mentari et al. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud)*.
- Munasyir. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana*. Universitas Syiah Kuala.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

## Intern Pemerintah

- Prastowo, Dwi. 1995. *Analisis laporan keuangan konsep dan aplikasi*. Unit penerbit dan percetakan AMP YKPN, Yogyakarta
- Prihadi, Toto. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit PPM, Yogyakarta
- Pujanira, Putriasri. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal / Volume VI Nomor 2 Tahun 2017*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara Semester II Tahun 2020.
- Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited).
- Republik Indonesia, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Republik Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan edisi 2019.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Edisi pertama*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syahadatina, Rika dan Ismantika Fitriyana. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1*. Universitas Madura.
- Triono, BRM. Suryo dan Septiana Novita Dewi. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (1), 2020, 213-220*. STIE AUB Surakarta.
- Triuwono, Edwin. 2018. *Proses Kontrak, Teori Agensi dan Corporate Governance*. Universitas Atma Jaya Makasar.
- Yadiati, Wiwin. 2010. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- [www.bpk.go.id/ihpps](http://www.bpk.go.id/ihpps)
- [www.jdih.inhil.kab.go.id](http://www.jdih.inhil.kab.go.id)
- <https://m.goriau.com/berita/baca/untuk-keempat-kalinya-pemkab-inhil-sukses-raih-opini-wtp.html> Kempat kalinya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sukses raih WTP.